

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARLI AGUSTA, ST**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. BURHANUDIN, S.H**
Jabatan : Bupati Belitung Timur

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

A circular official stamp of Kabupaten Belitung Timur is visible, featuring a bird emblem and the text "KABUPATEN BELITUNG TIMUR". Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "Drs. BURHANUDIN, SH" is printed in bold black text.

Drs. BURHANUDIN, SH

**Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama**

A blue ink signature, appearing to be "Harli Agusta", is written over a horizontal line.

**HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19750821 200212 1 005**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan investor yang berinvestasi	1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	32,8 persen
		2	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	100 persen
		3	Investor Baru yang Berinvestasi	55 investor
		4	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	62 investor
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	5	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Kualitas Tertinggi (94,53)
		6	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	96,57 persen
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	7	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100 persen
		8	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	100 persen
4	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	9	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	A ≥ 88,31- 100
		10	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB > 70-80 (72,51)
		11	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	92,31 Persen

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.359.300.052	APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 72.538.000	APBD
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 189.149.500	APBD
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 48.279.100	APBD
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 119.247.800	APBD
6. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 11.345.100	APBD

Pihak Kedua



Drs. BURHANUDIN, S.H

Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama



HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19750821 200212 1 005

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA OPD (ESELON 2)

OPD

TAHUN

ANGGARAN

: DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA 1	TARGE T	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA 2	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA 3	TARGE T	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN 4	TARGET	TARGET CAPAIAN	KET
Meningkatkan investor yang berinvestasi	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	32,8 Persen	Program Pengembangan Iklim Penanaman modal	Cakupan kebijakan daerah terkait penanaman modal yang telah ditetapkan	100 Persen	Penetapan Pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang majdi kewenangan daerah Kabupaten/kota	Kebijakan Daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	1 Kebijakan	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	10 Dokumen	TW 1 = -	6
												TW 2 = -	
					100 Persen	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	Persentase informasi investasi yang tersedia	100 Persen	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	TW 3 = -	
												TW 4 = 10	
			Program Promosi Penanaman Modal	Investor baru yang berinvestasi	55 Investor	Penyelenggaraan Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan	4 Sektor	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	1 Dokumen	TW 1 = -	
												TW 2 = -	
					62 Investor	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (laporan Kegiatan Penanaman Modal)		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12 Kegiatan Usaha	TW 3 = -	
												TW 4 = 9	
			Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	300 Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		8,5 Persen		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	TW 1 = -	
												TW 2 = 300	
					300 Pelaku Usaha							TW 3 = -	
												TW 4 = -	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA 1	TARGET T	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA 2	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET T	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN 4	TARGET	TARGET CAPAIAN	KET 6
									Pengawasan Penanaman Modal	umlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	75 Kegiatan Usaha	TW 1 = - TW 2 = 25 TW 3 = 15 TW 4 = 35	
Meningkatkan pelayanan perangkat daerah	Rata-rata tingkat kepatuhan pelayanan	Kualitas Tertinggi (94,53)	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	96,57 Persen	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Jumlah perizinan dan non perizinan	11 Persen	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	TW 1 = 200 TW 2 = 250 TW 3 = 300 TW 4 = 250	
									Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan beresaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan beresaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	60 Kegiatan Usaha	TW 1 = 7 TW 2 = 18 TW 3 = 15 TW 4 = 20	
Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100 Persen	Program Pengelolaan data dan sistem informasi	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	100 Persen	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	91 Persen	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Ditkaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	TW 1 = 3 TW 2 = 3 TW 3 = 3 TW 4 = 3	
									Perencanaan, dan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	TW 1 = - TW 2 = - TW 3 = 3 TW 4 = 1	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA 1	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA 2	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN 4	TARGET	TARGET CAPAIAN	KET
												5	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan keuangan sesuai standar	100 Persen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 Orang/bulan	TW 1 = 50	
												TW 2 = 50	
												TW 3 = 50	
												TW 4 = 50	
						Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase aparatus yang berkinerja baik	81 Persen	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	TW 1 = 2	
												TW 2 = 2	
												TW 3 = 2	
												TW 4 = 1	
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	4 Paket	TW 1 = 1	
												TW 2 = 1	
												TW 3 = -	
												TW 4 = 2	
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	TW 1 = 3	
												TW 2 = 3	
												TW 3 = 3	
												TW 4 = 3	
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	9 Paket	TW 1 = 2	
												TW 2 = 2	
												TW 3 = 3	
												TW 4 = 2	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	85 Persen	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang Disediakan	10 Paket	TW 1 = 2	
												TW 2 = 4	
												TW 3 = 4	
												TW 4 = -	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA 1	TARGE T	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA 2	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA 3	TARGE T	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN 4	TARGET	TARGET CAPAIAN	KET .								
	1			2			3			4		5	6								
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah BB > 70-80 (72,51)		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	92,31 Persen				Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	9 Paket	TW 1 = 2									
												TW 2 = 3									
																					TW 3 = 2
																					TW 4 = 2
																					TW 1 = -
																					TW 2 = 2
																					TW 3 = 2
																					TW 4 = -
																					TW 1 = 10
																					TW 2 = 20
																					TW 3 = 15
																					TW 4 = 10
																					TW 1 = 48
																					TW 2 = -
																					TW 3 = -
																					TW 4 = -
																					TW 1 = 3
																					TW 2 = 3
																					TW 3 = 3
																					TW 4 = 3
																					TW 1 = 3
																					TW 2 = 3
																					TW 3 = 3
																					TW 4 = 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA 1	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA 2	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN 4	TARGET	TARGET CAPAIAN	KET -
												5	6
									Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit	TW 1 = 11 TW 2 = 11 TW 3 = 11 TW 4 = 11	
						Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	95 Persen	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	TW 1 = - TW 2 = 1 TW 3 = - TW 4 = 2	
									Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	34 Unit	TW 1 = 6 TW 2 = 10 TW 3 = 10 TW 4 = 8	

Manggar, Januari 2025
Pihak Pertama

